

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	5
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	5
b.1 Kedudukan :	6
b.2 Tugas :	6
b.3 Fungsi :	7
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8
D. ISU STRATEGIS	9
E. sistematika penyajian	10
BAB II Perencanaan Dan Perjanjian kinerja	12
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
BAB III Akuntabilitas kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
a.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019	19
a.2 PERBANDINGAN Realisasi dan capaian DENGAN tahun sebelumnya	22
a.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Sasaran Tahun akhir periode Renstra	26
a.4 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019 dan Target Nasional (Jika Ada)	28
B. Analisis capaian kinerja sasaran	28
b.1 Sasaran Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	29
b.2. Sasaran Meningkatnya Pengamanan Informasi	33
b.3. Sasaran Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	35
b.4 Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	37

b.5 Meningkatkan Kerjasama Informasi Dengan Mas Media.	38
C. REALISASI ANGGARAN	41
c.1 Analisa Efisiensi	44
D. Tindak LANjut atas evaluasi laporan kinerja Tahun 2018	45
d.1. Evaluasi kinerja Tahun 2019	45
d.2. Tindak lanjut	45
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	46
Lampiran	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2019. LKjIP Tahun 2019 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Capaian kinerja tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian.

Didalam Laporan Kinerja ini mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Dalam penyusunan laporan kinerja ini masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah serta pedoman dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermamfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, Januari 2020
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian
Kabupaten Banjar,

Drs. H. M. AIDIL BASITH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660107 198903 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Banjar tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata - rata 107.42 %.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Dalam memberikan pelayanan yang baik di Bidang Komunikasi dan Informasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan pertama Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur, dan tujuan kedua Meningkatnya tata kelola Pemerintahan. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengacu pada prioritas program, aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat untuk mendukung strategi pembangunan masyarakat Kabupaten Banjar.

Sesuai APBD tahun anggaran 2019 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kabupaten Banjar mengelola anggaran belanja sebesar Rp 18,806,914,400,- (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3,230,531,952,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan Belanja Langsung Utama Rp 12,531,950,012 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Belaas Rupiah), Belanja Langsung Pendukung Rp 3,044,432,436,- (Tiga Miliar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 14,651,242,951,- (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 2,850,680,335,- (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 94.03 %.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan sasaran strategis Meningkatnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator Kinerja, yaitu :

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator ini memiliki target berupa nilai indeks sebesar 2.29, diakhir tahun 2019 Realisasi Kinerja sebesar 2.63 sehingga capaian untuk indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 114.85 %, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar Rp 5,961,550,000,- atau sebesar 38.27 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 5,771,655,879 atau sebesar 27.05 % dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sehingga capaian untuk realisasi anggaran sebesar 96.81 %, dari capaian yang diperoleh ada efisiensi anggaran sebesar 18.01 %.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memiliki target berupa nilai skor sebesar 70, diakhir tahun 2019 dapat terealisasi dengan skor 70 sehingga capaian untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100 %, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar Rp 6.570.400.012 atau sebesar 42.18 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 6.400.660.048 atau sebesar 41.09 % dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sehingga capaian untuk realisasi anggaran sebesar 97.4 %. Dengan pencapaian tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar 2.58 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan ..Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang (*Urusan yang diampu SKPD*) , maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

B.1 KEDUDUKAN :

1. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

B.2 TUGAS :

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;

B.3 FUNGSI :

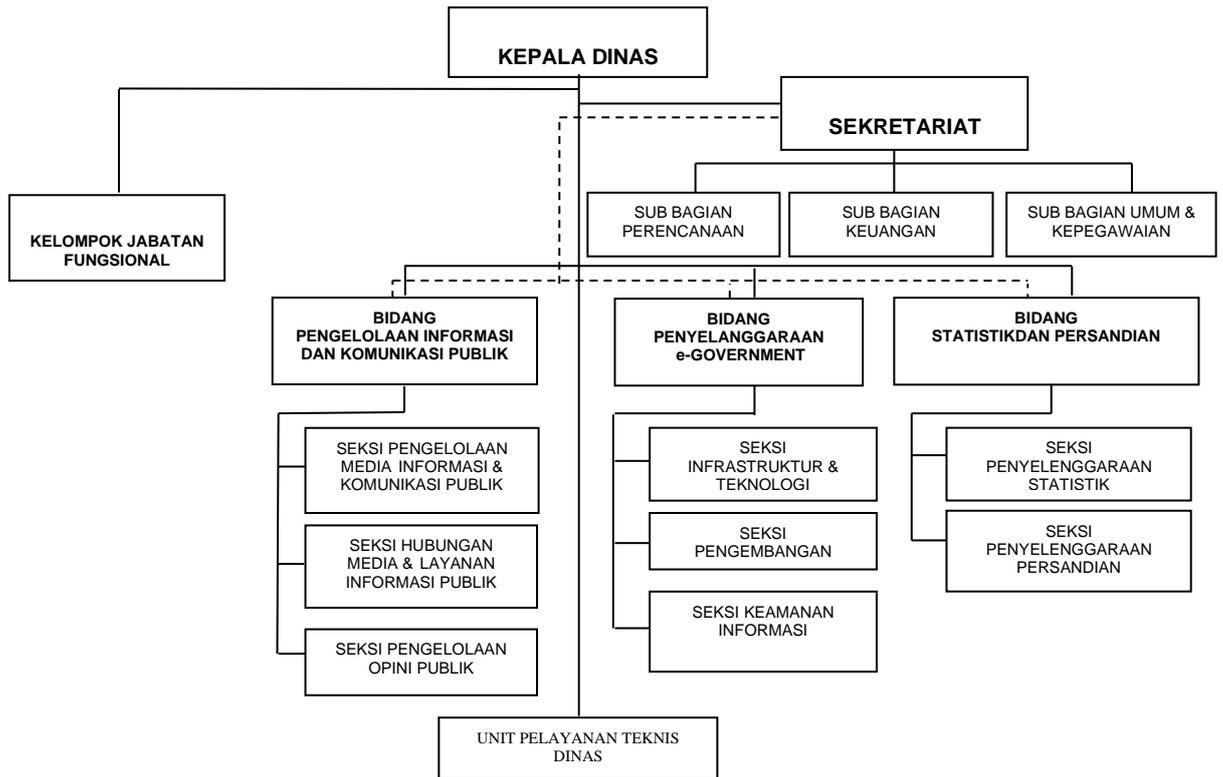
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

- a. *Kepala SKPD/Badan;*
 - b. *Sekretariat terdiri dari:*
 1. *Subbagian Perencanaan;*
 2. *Subbagian Keuangan; dan*
 3. *Subbagian Umum dan Kepegawaian;*
 - c. *Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari :*
 1. *Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik;*
 2. *Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik;*
 3. *Seksi Pengelolaan Opini Publik;*
 - d. *Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :*
 1. *Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi;*
 2. *Seksi Pengembangan Aplikasi; dan*
 3. *Seksi Keamanan Informasi E-Government*
 - e. *Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :*
 1. *Seksi Penyelenggaraan Statistik;*
 2. *Seksi Penyelenggaraan Persandian;*
 - f. *Unit Pelayanan Teknis Dinas;*
-

g. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini *Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* yang membantu Kepala Daerah dalam (melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara

"cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada SKPD

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	<i>Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik</i>	<i>Belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi</i>
			<i>Belum optimalnya transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)</i>
		<i>Belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik</i>	<i>Belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa</i>

D. ISU STRATEGIS

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. *Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok (*tugas SKPD*), memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan

kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (UNRESOLVED MATTERS) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang. Lebih jelasnya lihat alur renstra pada aplikasi SIMPUN 19.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis *Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* adalah Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan;

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala

tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengampu urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, *Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* mendukung pencapaian misi kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada

RPJMD yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Amanah.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama *Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* sebanyak 2 (dua) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara indeks Domain dan Bobot domain	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)	DKISP
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Informatif (Zona Hijau) dengan nilai :97-100 • Menuju Informatif (Zona Kuning) dengan nilai : 80-96 • Cukup Informatif (Zona Biru) dengan nilai : 60-79 • Kurang Informatif (Zona Merah), dengan nilai : 40-59 • Tidak Informatif (Zona Hitam) dengan nilai <39 	(Skor Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Menyediakan Informasi Publik dikali 20%)+(skor Pelayanan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik dikali 30%)	DKISP

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2019 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2019 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	1 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	level	2.29	a.	Program Pengamanan Informasi	a.	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	skor	273	292,200,000	Kabid Penyelenggaraan Statistik dan Persandian
					1	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian Dengan Mengacu Pada Pola Hubungan Sandi Yang Telah ditetapkan	Paket	1	50,000,000	Seksi Penyelenggaraan Persandian
					2.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.	Jumlah Koordinasi Persandian Yang dilaksanakan	Kali	4	242,200,000	Seksi Penyelenggaraan Persandian
					b.	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	b.1	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	Index	2.29	5,669,350,000	Kabid Penyelenggaraan E-Government
							b.2	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Index	2.57		Kabid Penyelenggaraan E-Government
							b.3	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	Index	2.15		Kabid Penyelenggaraan E-Government
					1.	Kegiatan Layanan nama Sub Domain, website bagi Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik	1.	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola	Sub Domain	50	590,000,000	Kasi Pengembangan Aplikasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
					2.	Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi e.Government	2.	Jumlah SKPD yang menjadi objek Pentest	SKPD	15	200,000,000	kasi keamanan informasi e-government	
					3.	Kegiatan Penyelenggaraan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah	3.	Jumlah SKPD yang terlayani Internet dan Intranet	lokasi	30	3,892,000,000	kasi infrastruktur dan teknologi informasi	
					4.	Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi	4.	Jumlah Ketersediaan aplikasi yang aktif	Aplikasi	4	229,350,000	kasi pengembangan aplikasi	
					5.	Kegiatan Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity/Smartregency	5.	jumlah pelaksanaan G to G, G to C, G to B	Keg	2	250,000,000	kasi infrastruktur dan teknologi informasi	
					6.	Kegiatan Perumusan Regulasi, kebijakan dan Monev Penyelenggaraan E.Government	6.	Jumlah Peraturan Bidang TIK	Doc	1	508,000,000	kasi infrastruktur dan teknologi informasi	
					c.	Program Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	c.	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	%	66.6	545,400,000	Kabid Penyelenggaraan Statistik dan Persandian	
		2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	70	1.	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	1.	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	dok	1	359,600,000	Seksi Penyelenggaraan Statistik
						2.	Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah	2.	Jumlah laporan Analisis	dok	1	185,800,000	Seksi Penyelenggaraan Statistik
						d.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	d.	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	%	91	6,025,000,012	Kabid Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Publik
					1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1. Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat media Visual Milik daerah	berita	1,027	1,387,600,000	kasi pengelolaan media informasi dan komunikasi publik
						2. Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah	berita	1,050		kasi pengelolaan media informasi dan komunikasi publik
						3. Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui Info Publik Media Center	berita	1,360		kasi pengelolaan media informasi dan komunikasi publik
					2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Media yang Bekerjasama	media	30	4,265,600,012	kasi hubungan media dan layanan informasi publik
						2. Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan	kali	0		kasi hubungan media dan layanan informasi publik
						3. Jumlah surat kabar harian yang disebarakan	eks	200,000		kasi hubungan media dan layanan informasi publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Jumlah laporan Analisis kajian Tranding Topik Media	dok	4		kasi hubungan media dan layanan informasi publik
						5. Jumlah baleho yang di cetak	m2	4,608		kasi hubungan media dan layanan informasi publik
					3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	1. Jumlah Sosialisasi kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	kali	4	371,800,000	kasi pengelolaan opini publik
						2. Jumlah Sosialisasi Lapor yang dilaksanakan	kali	1		kasi pengelolaan opini publik
						3. Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	kali	1		kasi pengelolaan opini publik
						4. Jumlah Pameran / Expo yang diikuti	kali	1		kasi pengelolaan opini publik

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$<40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2019

sasaran strategis / sasaran program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)	Level	2.29	2.63	114.85	Berhasil
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	Skortata kelola keamanan informasi+skor Pengelolaan Risiko + skor Kerangka Kerja keamanan Informasi + skor Pengelolaan Aset informasi+ skor teknologi dan keamanan informasi	skor	273	103	37.73	Tdk Berhasil

sasaran strategis / sasaran program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai rata-rata dari 17 Indikator yang ada di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE	Index	2.29	2.94	128.38	Berhasil
	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Nilai rata-rata dari 7 indikator yang ada di aspek Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Index	2.57	1.57	61.09	Kurang Berhasil
	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	Nilai rata-rata dari 13 indikator yang ada di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Index	2.15	3.08	143.26	Berhasil
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	(Skor Pengembangan website dan mengumumkan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Menyediakan Informasi Publik dikali 20%)+(skor Pelayanan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik dikali 30%)	Skor	70	70	100.00	Berhasil
Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	(\sum item data statistik sektoral di tahun (n-1+n)) dibagi (\sum target item data statistik di akhir RPJMD) X 100	%	66.6	66.6	100.00	Berhasil
Meningkatnya Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	(Rata-rata Persentase Berita Positif di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) dibagi (Rata-rata Persentase seluruh Berita di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) X 100	%	91	76.93	84.54	Cukup Berhasil

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari kinerja strategis (*SKPD*) sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	Jumlah Desa/ kelurahan di kabupaten banjar yang dapat mengakses interbet dan telepon seluler dibagi jumlah desa / kelurahan yang ada di kabupaten Banjar dikali 100	%	NA	NA	80.34	113.15	92	120.51	Tdk Menjadi Indikator lagi	
2	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	Jumlah SKPD yang sudah menggunakan Domain dan Sub Domain @banjarkab.go.id dibagi jumlah SKPD di Pemkab Banjar dikali 100	%	NA	NA	88.23	121.31	100	125		
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	Jumlah pengaduan yang ditanggapi di bagi jumlah aduan yang masuk dikali 100	%	NA	NA	100	100	100	100		
4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)	Level	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.63	114.85

NO	INDIKATOR KINERJA	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	Skor tata kelola keamanan informasi+skor Pengelolaan Risiko + skor Kerangka Kerja keamanan Informasi + skor Pengelolaan Aset informasi+ skor teknologi dan keamanan informasi	skor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	103	37.73
6	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai rata-rata dari 17 Indikator yang ada di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE	Index	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.94	128.38
7	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Nilai rata-rata dari 7 indikator yang ada di aspek Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Index	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.57	61.09
8	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	Nilai rata-rata dari 13 indikator yang ada di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Index	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.08	143.26

NO	INDIKATOR KINERJA	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	(Skor Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Menyediakan Informasi Publik dikali 20%)+(skor Pelayanan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik dikali30%)	Skor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	100.00
10	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	(Σ item data statistik sektoral di tahun (n-1+n)) dibagi (Σ target item data statistik di akhir RPJMD) X 100	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66.6	100.00
11	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	(Rata-rata Persentase Berita Positif di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) dibagi (Rata-rata Persentase Berita di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) X 100	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76.93	84.54

Sumber :

Nb : Indikator yang masih digunakan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tambahkan ilustrasi gambar/grafik dan penjelasannya

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2019 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2019 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan (*SKPD*) selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Periode Akhir

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	(NID Kebijakan Internal dikali 17 %)+(NID Tata kelola dikali 28 %)+(NID Layanan SPBE dikali 55 %)	Level	2.63	2.8	93.93
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	Skor tata kelola keamanan informasi+skor Pengelolaan Risiko + skor Kerangka Kerja keamanan Informasi + skor Pengelolaan Aset informasi+ skor teknologi dan keamanan informasi	skor	103	550	18.73
Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai rata-rata dari 17 Indikator yang ada di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE	Index	2.94	2.41	121.99

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Nilai rata-rata dari 7 indikator yang ada di aspek Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Index	1.57	3	52.33
	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	Nilai rata-rata dari 13 indikator yang ada di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Index	3.08	2.79	110.39
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	(Skor Pengembangan website dan Mengumumkan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Menyediakan Informasi Publik dikali 20%)+(skor Pelayanan Informasi Publik dikali 25%)+(Skor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik dikali 30%)	Skor	70	90	77.78
Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	(\sum item data statistik sektoral di tahun (n-1+n)) dibagi (\sum target item data statistik di akhir RPJMD) X 100	%	66.6	100	66.60
Meningkatnya Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	(Rata-rata Persentase Berita Positif di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) dibagi (Rata-rata Persentase Berita di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) X 100	%	76.93	97	79.31

Sumber :

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 DAN TARGET NASIONAL (JIKA ADA)

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019, Target Provinsi Dan Nasional

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2019	Target Nasional Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Level			2.63
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	skor			103
Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	Index			2.94
	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Index			1.57
	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	Index			3.08
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor			70
Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	%			66.6
Meningkatnya Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	%			76.93

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

B.1 SASARAN MENINGKATNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan sasaran strategis Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator Kinerja, yaitu :

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks SPBE merupakan nilai menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Tabel 3.5.1
Kategori Indeks SPBE :

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4.2 – 5.0	Memuaskan
2	3.5 – < 4.2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan

- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Gambar 2. Struktur Penilaian SPBE



Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.5.2, Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 3.5.2
Bobot dan Penilaian Penghitungan Indeks SPBE

NAMA INDEKS	Jumlah Indikator	Total Bobot	Nilai 2019
SPBE			2.63
Kebijakan Internal SPBE	17	17 %	2.94
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7 %	2.43
Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%	3.30
Tata Kelola SPBE	7	28 %	1.57
Kelembagaan	2	8 %	1.00
Strategi dan Perencanaan	2	8 %	2.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12 %	1.67
Layanan SPBE	11	55 %	3.08
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35 %	3.00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20 %	3.17

Indikator ini memiliki target berupa nilai Indeks SPBE sebesar 2.29, diakhir tahun 2019 Realisasi Kinerja sebesar 2.63 atau predikat SPBE Baik sehingga capaian untuk indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 114.85 %, ini berarti termasuk dalam kriteria **Berhasil**.sehinga realisasi indeks SPBE pada tahun 2019 telah menyumbang sebesar 93.93 % untuk capaian periode akhir Renstra 2021.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar Rp 5,961,550,000,- atau sebesar 38.27 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 5,771,655,879 atau sebesar 27.05 % dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sehingga capaian untuk realisasi anggaran sebesar 96.81 % dari capaian yang diperoleh ada efesiensi anggaran sebesar 18.01 %.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Indikator ini memiliki target berupa nilai skor sebesar 70, diakhir tahun 2019 dapat terealisasi dengan skor 70 atau termasuk cukup informatif, dari angka realisasi tersebut sehingga diperoleh capaian untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100 %, ini berarti jug termasuk dalam kriteria **Berhasil**.sehingga realisasi di tahun 2019 telah menyumbang 77.78 untuk capaian periode akhir Rensta 2021.

Tabel 3.5.3
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	INFORMATIF	97-100
2	MENUJU INFORMATIF	80-96
3	CUKUP INFORMATIF	60-79
4	KURANG INFORMATIF	40-59
5	TIDAK INFORMATIF	<39

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp 6.570.400.012 atau sebesar 42.18 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 6.400.660.048 atau sebesar 41.09 % dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sehingga capaian untuk realisasi anggaran sebesar 97.4 %. Dengan pencapaian tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar 2.58 %.Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5.4
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.29	2.63	114.85
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70.00	70.00	100.00

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) *Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan;*
- 2) *Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan bersama;*

- 3) *Adanya Regulasi berupa Perbub Tata Kelola informasi, Masterplan Smart city dan Arsitektur SPBE;*

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) *Menentukan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP Proses Bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku;*
- 2) *Menyusun rumusan kebijakan agar SKPD memanfaatkan infrastruktur Diskominfo.*
- 3) *Dukungan pimpinan terhadap akselerasi kinerja PPID; dan*
- 4) *Kerjasama yang baik dengan seluruh PPID pembantu dalam menunjang kelancaran Sosialisasi dan pelatihan PPID;*

Upaya perbaikan :

- 1) Pembentukan pusat data di daerah
- 2) Integrasi Sistem Aplikasi

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) *Menggunakan tenaga ahli yang tepat baik komposisi maupun kualifikasi;*

B.2. SASARAN MENINGKATNYA PENGAMANAN INFORMASI

Meningkatnya Pengamanan Informasi merupakan sasaran di level Eselon III yang didukung oleh program Pengamanan Informasi. Program ini memiliki indikator berupa Pemingkatan Level Keamanan Informasi yang dihitung berdasarkan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

1. Peran TIK
2. Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

5. Pengelolaan Aset informasi
6. Teknologi dan Keamanan Informasi

Ditahun 2019 Indikator ini mempuntai target kinerja berupa nilai indeks dengan Skor 273, dengan realisasi berada di skor 103 ini berarti termasuk kurang berhasil. indikator ini hanya berkontribusi sebesar 18,73 % untuk pencapaian periode akhir Renstra 2021;

Tabel 3.5.5
Tabel Kategori keamanan Informasi

PERAN TIK SEDANG	INDEKS (SKOR)		STATUS KESIAPAN
16 s/d 34	0	272	TIDAK LAYAK
	273	455	PEMENUHAN KERANGKA DASAR
	456	583	BAIK / CUKUP
	584	645	BAIK

Tabel 3.5.6
Skor Indeks Keamanan Informasi Diskominfo tahun 2019

SKOR PERAN TIK	SKOR					Total Skor	Status Kesiapan
	Tata Kelola	Pengelola an Risiko	Kerangka Kerja	Pengelola an Aset	Aspek Teknologi		
20	16	4	14	24	45	103	Tidak Layak

Tabel 3.5.7
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	273	103	37,73 %

Faktor kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Masih kurangnya pemahaman pentingnya persandian dan keamanan informasi;
- 2) Belum adanya Regulasi tentang Keamanan Informasi di Daerah;
- 3) SDM yang belum berkompeten di bidang Keamanan Informasi;

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) *Menentukan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP Proses Bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku;*

Upaya perbaikan :

- 1) Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pelatihan keamanan Informasi;
- 2) Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian operasional persandian dan keamanan informasi kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Mendorong sertifikat digital dalam rangka pengamanan informasi, serta efisiensi dan efektifitas kegiatan;
- 2) Penambahan tenaga persandian melalui diklat yang di selenggarakan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara);

B.3. SASARAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan sasaran dilevel Esselon III yang didukung oleh program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sasaran ini memiliki indikator berupa :

1. Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE;
indikator ini merupakan Nilai rata-rata dari 17 Indikator yang ada di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE. Untuk tahun 2019 target kinerja berupa nilai indeks sebesar 2.29, adapun realisasi nilai indek yang di capai sebesar 2.63 sehingga capaiannya sebesar 114.85 % atau kriteria berhasil.
2. Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE;
indikator ini merupakan Nilai rata-rata dari 7 indikator yang ada di aspek Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target kinerja berupa nilai indeks sebesar 2.57, adapun realisasi sebesar 1.57 sehingga capaian ditahun 2019 ini sebesar 61.09 atau termasuk kriteria kurang berhasil.

3. Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE; indikator ini merupakan Nilai rata-rata dari 13 indikator yang ada di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target kinerja berupa nilai indeks sebesar 2.15, adapun realisasi yang dicapai sebesar 3.08 sehingga capaian ditahun 2019 sebesar 143.26 atau termasuk kriteria berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5.8
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	2.29	2.63	114.85
Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	2.57	1.57	61.09
Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	2.15	3.08	143.26

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Terbangunnya sistem jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung seluruh SKPD dalam memberikan pelayanan berbasis e-Government berupa jaringan Fiber Optik;
- 2) Peningkatan Ruang Publik yang terpantau CCTV dan terlayani wifi;
- 3) Tingkat Kecepatan internet

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Secara umum permasalahan yang terjadi pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi;

Upaya perbaikan :

- 1) Ke depan akan dilakukan backup jaringan dan assesmen jaringan ke SKPD-SKPD untuk memberikan rekomendasi permasalahan sehingga gangguan internet dapat diminimalisir;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Meningkatkan kualitas website pemerintah daerah melalui pembenahan desain baik dari sisi tampilan maupun kemudahan akses dan fitur serta meningkatkan kelengkapan content atau database yang termuat di dalam website pemerintah daerah;

B.4 MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI / STATISTIK DAERAH

Sasaran ini mempunyai indikator Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat. perhitungan untuk indikator ini yakni jumlah item statisti sektoral ditahun (n-1) + tahun n dibagi target item data di akhir RPJMD (atau 42 item). ditahun 2019 indikator ini memiliki tareget kinerja sebesar 66.6 % dan dapat terealisasi sebesar 66.6 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 % atau termasuk kriteria berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5.9
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	66.6	66.6	100

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Adanya Forum data yang terstruktur dalam rangka pengambilan kebijakan data dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan oleh seluruh anggota forum;

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Mendorong BPS Pusat untuk menyusun standarisasi data statistik sektoral untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Upaya perbaikan :

- 1) Melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan SKPD untuk pengelolaan data statistik sektoral secara baik dan kontribusi pada aplikasi Single Data System dan Open Data;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Sosialisasi dan pelatihan terhadap user agar memahami secara detail pengoperasian sistem aplikasi Satu Data, dan pendampingan khusus kepada SKPD;

B.5 MENINGKATNYA KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA.

Sasaran ini mempunyai indikator berupa Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar. Indikator ini ditujukan sebagai alat kontrol Pemerintah terhadap persepsi publik, yang dalam hal ini melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak koran harian dan media online . Selain itu, indikator ini dimaksudkan untuk memunculkan citra positif Pemerintah Kabupaten Banjar dengan mengedepankan bukti prestasi atas kinerja, bukan hanya sekedar cerita.

Berita tentang Pemerintah Kabupaten Banjar pada indikator ini dikhususkan pada Media cetak koran dan media online yang terbit di Kabupaten Banjar. Dari beberapa Media Cetak dan Online yang ada di Kabupaten Banjar dilakukan pencarian atas berita-berita terkait kinerja pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian Berita-berita tersebut dikelompokkan menjadi dua, berita positif dan berita negatif, kedua kategori ini diperbandingkan dan dihitung Rasionya.

Untuk menghitung persentase capaian outcome (Indikator Program), dikhususkan pada capaian berita Positif, dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja berita positif pada selang waktu tertentu dengan target berita positif pada selang waktu yang sama.

Indikator Program ini menggunakan Formula "(Rata-rata Persentase Berita Positif di media tentang kabupaten Banjar pada tahun n) dibagi

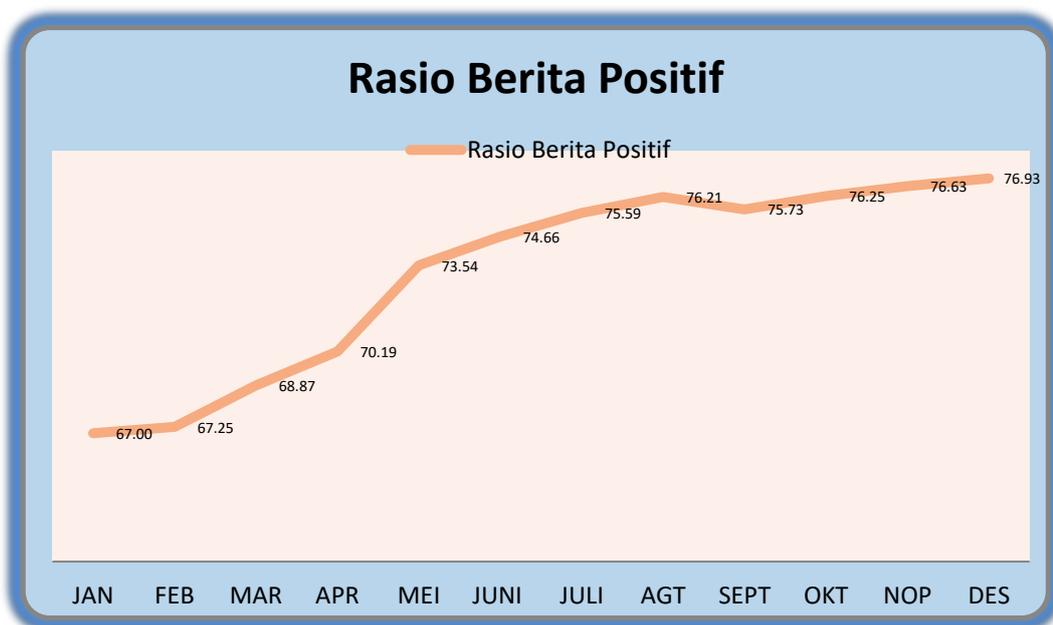
(Rata-rata Persentase Berita dimedia tentang kabupaten Banjar pada tahun n) X 100).

Ditahun 2019 inidikator ini memiliki target kinerja sebesar 91 % (91:9) dan dapat terealisasi sebesar 76.93 % (76.93 : 23.07) sehingga capaian indikator ini sebesar 84.54 %

Tabel 3.5.10
Jumlah Berita Positif dan Negatif

TWI	KATEGORI BERITA	JUMLAH	RATA-RATA	RASIO
	POSITIF	281	93.67	68.87
	NEGATIF	127	42.33	31.13
	TOTAL	408	136.00	100
TWII	KATEGORI BERITA	JUMLAH	RATA-RATA	RASIO
	POSITIF	557	92.83	74.66
	NEGATIF	189	31.50	25.34
	TOTAL	746	124.33	100
TWIII	KATEGORI BERITA	JUMLAH	RATA-RATA	RASIO
	POSITIF	861	95.67	75.73
	NEGATIF	276	30.67	24.27
	TOTAL	1137	126.33	100
TW IV	KATEGORI BERITA	JUMLAH	RATA-RATA	RASIO
	POSITIF	1234	102.83	76.93
	NEGATIF	370	30.83	23.07
	TOTAL	1604	133.67	100.00

Gambar 2
Grafik Berita selama tahun 2019



Tabel 3.5.11
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	91	76.93	84.85

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Adanya Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan Media Massa dan Media daring lokal maupun nasional;
- 2) Penggunaan Sosial media dalam menyebarkan berita-berita positif tentang kabupaten Banjar;
- 3) Adanya Pemberitaan Internal (Intan TV, Radio Swara Banjar, dan Media Center) yang turut berkontribusi dalam publikasi berita perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar;

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Kontribusi tidak memiliki variabel dari pihak ketiga dalam hal ini media lokal dan nasional, selain itu kebijakan dari Kepala daerah merupakan hal utama dalam hubungan dengan media dan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan Rasio Berita positif dikabupaten Banjar;

Upaya perbaikan :

- 1) Memfasilitasi wartawan / rekan-rekan media dalam peningkatan wawasan jurnalistik;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) membangun Komunikasi aktif dengan media-media yang meliput pemberitaan di wilayah Kabupaten Banjar

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2019 adalah sebesar Rp 17,501,923,286,- (93.06 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 2,850,680,335,- (16.3% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 14,651,242,951,- (83.71 % dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp 12,172,315,927,- (97.1% dari total anggaran yang dilokasikan untuk proram utama sebesar Rp 12,531,950,012,-) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp 2,478,927,024,- (81.4% total anggaran yang dilokasikan untuk proram pendukung sebesar Rp 3,044,432,436,-), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2,850,680,335,00 (88.2 % dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3,230,531,952).

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% Realisasi (capaian)	TARGET	REALISASI	% Realisasi (capaian)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.29	2.63	114.85	5,961,550,000	5,771,655,879	96.81
2.	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Pemeringkatan Level Keamanan Informasi	273	130	47.62	292,200,000	276,842,195	94.74
3.	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE	2.29	2.94	128.38	5,669,350,000	5,494,813,684	96.92
		Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	3.57	1.57	43.98			
		Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE	2.15	3.08	143.26			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% Realisasi (capaian)	TARGET	REALISASI	% Realisasi (capaian)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	70	100.00	6,570,400,012	6,400,660,048	97.42
5.	Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	66.6	66.6	100.00	545,400,000	531,723,500	97.49
6.	Meningkatnya Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kabupaten Banjar	91	76.93	84.54	6,025,000,012	5,868,936,548	97.41
Total Belanja Langsung						12,531,950,012	12,172,315,927	97.1
Total Belanja Langsung Pendukung						3,044,432,436	2,478,927,024	81.4
Total Belanja Tidak Langsung						3,230,531,952	2,850,680,335	88.2

C.1 ANALISA EFISIENSI

Terlihat bahwa dari 5 (lima) sasaran yang ada, sebanyak 2 (dua) sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 % yaitu, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Untuk sasaran Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik, telah mencapai kinerja sebanyak 107.42 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97.12 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sasaran Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah juga menunjukkan capaian yang serupa, dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan realisasi anggaran hanya sebesar 97.49 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7
Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	114.85	96.81	3.19
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100.00	97.42	2.58
2.	Meningkatnya Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah	Persentase Layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	100.00	97.49	2.51

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja (SKPD) Banjar Tahun 2019 memperoleh nilai **74.50** dengan interpretasi predikat **BB**, maka pada tahun 2019 direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupateb Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja agar dapat dijadikan dasar sistem Reward dan Punishment;
2. Meningkatkan Kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan bahwa perencanaan didahului dengan merencanakan kinerja (hasil), baru kemudian merencanakan kebutuhan anggaran. memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan Kinerja Utama dengan penganggarnya (mengaitkan indikator Kinerja utama dengan anggarannya);
3. Mengimplemtasikan / memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta penilaian dan peningkatan kinerja;

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keberhasilan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2019 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tahun 2019 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2018, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meski terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang di tetapkan maka Kominfo, Statistik dan Persandian akan terus meningkatkan kerja program dan kegiatan guna mencapai kinerja dimaksud;

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD untuk saling mendukung program Satu Data kabupaten Banjar maupun optimalisasi penggunaan system informasi daerah;

3. Secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis, maupun kegiatan lain yang dipandang mampu menambah kemampuan Sumberdaya Aparatur SKPD;
4. Ke depan akan dilakukan backup jaringan dan assesment jaringan ke SKPD untuk memberikan rekomendasi permasalahan sehingga gangguan internet dapat diminimalisir;

Laporan Kinerja *Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar* tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

.....
.....